



PERAN KEPALA SEKOLAH PENGGERAK DALAM MENGEMBANGKAN KURIKULUM BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN INDUSTRI

Jessica Dhea Suryani¹, Muhamad Suhardi², Haromain³

Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Pendidikan Mandalika^{1, 2, 3}

e-mail: jessicadheasuryaniputri@gmail.com

Diterima: 06/08/2026; Direvisi: 10/09/2026; Diterbitkan: 29/09/2026

ABSTRAK

Kebutuhan penyelarasan kurikulum dengan potensi daerah serta kebutuhan nyata masyarakat dan dunia kerja menuntut peran strategis Kepala Sekolah Penggerak dalam mengembangkan kurikulum yang relevan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemahaman, langkah, serta peran Kepala Sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang relevan di SMAN 2 Sumbawa Besar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan penelaahan dokumen. Subjek penelitian meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan perwakilan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan melalui penelaahan regulasi dan hasil belajar, identifikasi kondisi serta potensi lokal, pelibatan guru dan pemangku kepentingan, penyusunan dan implementasi kurikulum, serta evaluasi berkala. Potensi pertanian, peternakan, kelautan, dan pariwisata Sumbawa diintegrasikan dalam pembelajaran dan diperkuat melalui kemitraan dengan berbagai pihak. Kepala Sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengarahkan, mengoordinasikan, memfasilitasi peningkatan kompetensi guru, dan mendorong inovasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang partisipatif dan kolaboratif berperan penting dalam mewujudkan kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan lingkungan.

Kata kunci: *Kepala Sekolah Penggerak, Pengembangan Kurikulum, Potensi Lokal, Kemitraan Pendidikan.*

ABSTRACT

The need to align the curriculum with regional potential and the actual needs of society and the world of work highlights the strategic role of Principals of Sekolah Penggerak in developing relevant curricula. This study aimed to describe the principal's understanding, steps, and role in developing a relevant curriculum at SMAN 2 Sumbawa Besar. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and document review. The research subjects included the principal, vice principal for curriculum affairs, and teacher representatives. The findings showed that curriculum development was carried out through reviewing educational regulations and student learning outcomes, identifying school conditions and local potential, involving teachers and stakeholders, developing and implementing the curriculum, and conducting periodic evaluations. The agricultural, livestock, marine, and tourism potential of Sumbawa was integrated into learning and strengthened through partnerships with various stakeholders. The principal acted as an instructional leader who provided direction, coordinated school members, facilitated teacher competency development, and encouraged innovation. These findings



indicate that participatory and collaborative leadership plays an important role in realizing a contextual curriculum that is relevant to the needs of the surrounding environment.

Keywords: *Driving School Principal, Curriculum Development, Local Potential, Educational Partnership.*

PENDAHULUAN

Relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja menjadi salah satu tuntutan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan dunia kerja. Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja diperlukan agar kompetensi yang dikembangkan melalui pendidikan tetap sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan profesional yang terus berubah (Akhtar et al., 2024). Kesesuaian antara kesempatan pembelajaran di perguruan tinggi dan tuntutan keterampilan di pasar kerja juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi transisi menuju dunia kerja (Lohberger & Braun, 2022). Dalam konteks tersebut, sekolah tidak cukup hanya memastikan ketercapaian kompetensi yang ditetapkan secara nasional, tetapi juga perlu mengembangkan pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum perlu memberikan ruang bagi sekolah untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, serta perkembangan ekonomi di lingkungan sekitar (OECD, 2021). Dengan demikian, pengembangan kurikulum perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian akademik, tetapi juga pada kemampuan peserta didik untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat serta menghadapi tuntutan dunia kerja.

Urgensi tersebut berkaitan dengan masih adanya kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh peserta didik melalui pendidikan dan kebutuhan yang berkembang di lingkungan kerja. Lulusan dapat memiliki capaian akademik yang memadai, tetapi belum selalu memiliki keterampilan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan dan kebutuhan dunia usaha maupun industri (Faishal, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa relevansi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh isi pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan lingkungan dan menerjemahkannya ke dalam proses pengembangan kurikulum. Kesenjangan tersebut dapat semakin melebar ketika pihak eksternal belum terlibat secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sebaliknya, keterlibatan mitra industri dapat membantu memastikan bahwa kompetensi yang dikembangkan lebih sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan meningkatkan kesiapan peserta didik memasuki dunia kerja (Borah et al., 2021). Keterlibatan praktisi dan pemangku kepentingan eksternal juga penting untuk menjaga agar materi dan kompetensi pembelajaran tetap selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang (Otache, 2022).

Persoalan relevansi tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan karakteristik dan potensi daerah. Ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri juga berkaitan dengan persoalan pengangguran pada lulusan pendidikan menengah (Setiyana & Oktora, 2024). Dalam konteks Sumbawa, keberadaan potensi pada sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan pariwisata dapat menjadi sumber pembelajaran kontekstual bagi peserta didik. Pemanfaatan potensi tersebut dalam kurikulum memungkinkan sekolah menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas sosial dan ekonomi di lingkungan siswa sehingga pengalaman belajar menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat (Nisa, 2022). Oleh karena itu, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal tidak hanya menjadi upaya untuk mendekatkan pembelajaran dengan



lingkungan peserta didik, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi mempersiapkan mereka menghadapi peluang dan kebutuhan yang berkembang di daerahnya.

Kebutuhan untuk mengembangkan kurikulum yang kontekstual tersebut memperoleh ruang melalui kebijakan Sekolah Penggerak yang mendorong transformasi pembelajaran dan penguatan kapasitas satuan pendidikan dalam menyesuaikan proses pendidikan dengan karakteristik sekolah. Dalam konteks ini, kepala sekolah memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengarahkan perubahan, mengoordinasikan warga sekolah, dan membangun kondisi yang mendukung inovasi pendidikan (Rahayu et al., 2022). Kepala sekolah perlu memastikan bahwa pengembangan kurikulum tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi diterjemahkan menjadi program dan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta lingkungan sekolah. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi, pengembangan profesional guru, dan penyesuaian program dengan konteks lokal sekolah (Nari et al., 2024). Dengan adanya ruang pengembangan tersebut, sekolah memiliki peluang untuk menghubungkan kebijakan kurikulum dengan karakteristik masyarakat dan perkembangan kebutuhan dunia kerja di daerah. Implementasi kurikulum yang memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan kontekstual juga dapat mendukung penyediaan pengalaman belajar dan materi yang lebih relevan bagi peserta didik (Winarto & Rindaningsih, 2025).

Dalam menjalankan peran tersebut, kepala sekolah tidak dapat bekerja secara internal tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan. Pengembangan kurikulum membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya agar keputusan yang diambil memiliki keterkaitan dengan kebutuhan nyata di lingkungan sekolah. Kompetensi komunikasi kepala sekolah menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi internal yang efektif, terutama dalam menjalin hubungan dengan guru dan warga sekolah untuk mendukung koordinasi serta pelaksanaan program pendidikan (Neiroukh et al., 2024). Pada saat yang sama, keterlibatan keluarga dan komunitas dapat memperkuat kemitraan dalam mendukung kebutuhan peserta didik dan sekolah (Mayger & Provinzano, 2022). Kemampuan kepala sekolah dalam mengenali kebutuhan lingkungan dan mengarahkannya ke dalam perencanaan serta pelaksanaan kurikulum menjadi bagian penting dari kepemimpinan pendidikan (Isa et al., 2022). Dengan demikian, kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum tidak hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan internal, tetapi juga dengan kemampuan membangun kolaborasi agar kurikulum memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan pentingnya keterhubungan antara sekolah dan pihak eksternal dalam meningkatkan relevansi pendidikan. Hasan et al. (2022) menunjukkan pentingnya hubungan dan kerja sama dengan pihak luar dalam mendukung penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan yang berkembang. Sejalan dengan temuan tersebut, Islamiah et al. (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak dapat memberikan informasi dan wawasan yang dibutuhkan sekolah dalam memahami kompetensi yang relevan bagi peserta didik. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat dan industri memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan, bukan hanya keputusan yang dibuat secara internal oleh sekolah. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menggambarkan bagaimana kepala sekolah dalam



konteks Sekolah Penggerak mengoordinasikan keterlibatan berbagai pihak tersebut sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan menengah.

Keterbatasan kajian tersebut juga terlihat dari kecenderungan penelitian mengenai kepala sekolah dan pengembangan kurikulum yang masih membahas kepemimpinan sekolah atau pengembangan kurikulum sebagai fokus yang berdiri sendiri. Padahal, dalam praktik Sekolah Penggerak, kedua aspek tersebut saling berkaitan karena kepala sekolah berperan dalam mengarahkan perencanaan, menggerakkan warga sekolah, membangun kemitraan, serta memastikan kurikulum dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Rahayu et al. (2022) dan Utaminingsih et al. (2023) memberikan dasar bahwa kepemimpinan sekolah memiliki keterkaitan dengan proses perubahan dan pengembangan pendidikan, tetapi belum memberikan gambaran yang secara khusus menguraikan rangkaian peran kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dan industri dengan konteks lokal. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian yang melihat secara lebih utuh bagaimana kepala sekolah menjalankan perannya dalam proses tersebut, mulai dari memahami kebutuhan, menentukan langkah pengembangan, hingga mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dilakukan di SMAN 2 Sumbawa Besar untuk mendeskripsikan pemahaman, langkah, serta peran Kepala Sekolah Penggerak dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menggambarkan praktik kepemimpinan kepala sekolah dalam menghubungkan kebijakan Sekolah Penggerak, potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan dunia kerja dalam proses pengembangan kurikulum. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai praktik pengembangan kurikulum yang kontekstual pada satuan pendidikan menengah serta menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dan pemangku kebijakan dalam memperkuat relevansi kurikulum dengan kebutuhan lingkungan dan perkembangan dunia kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan pemahaman, langkah, dan peran Kepala Sekolah Penggerak dalam mengembangkan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Penelitian dilaksanakan di SMAN 2 Sumbawa Besar pada semester ganjil tahun ajaran 2026/2027. Informan penelitian terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan guru yang terlibat langsung dalam penyusunan serta pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, serta dokumentasi berupa dokumen kurikulum, perangkat pembelajaran, dokumen kerja sama dengan pihak eksternal, dan hasil evaluasi pembelajaran. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi yang dikembangkan peneliti melalui proses konsultasi dan revisi bersama dosen pembimbing serta telah memperoleh persetujuan dosen pembimbing sebelum digunakan.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui pemilahan dan pengelompokan data sesuai fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk uraian tematik, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data. Analisis difokuskan pada tiga aspek, yaitu pemahaman kepala sekolah mengenai kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat dan industri, langkah yang dilakukan dalam pengembangannya, serta peran kepala sekolah dalam mengarahkan dan mengoordinasikan proses tersebut. Keabsahan data dilakukan melalui



triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi hasil wawancara antarinforman serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumen yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman Kepala Sekolah mengenai kurikulum yang relevan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga mencakup penguatan karakter, keterampilan, potensi daerah, serta kesiapan siswa menghadapi dunia kerja dan pendidikan tinggi. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah dan proses pengembangan kurikulum di SMAN 2 Sumbawa Besar. Pengembangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan pendidikan, hasil belajar, kondisi peserta didik, potensi lingkungan, serta masukan dari berbagai pihak. Untuk memperlihatkan secara ringkas pemahaman dan langkah yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum, temuan penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemahaman dan Langkah Pengembangan Kurikulum di SMAN 2 Sumbawa Besar

Aspek	Temuan Penelitian	Bentuk Pelaksanaan
Pemahaman kurikulum	Kurikulum dipahami sebagai sarana pengembangan kompetensi akademik, karakter, dan keterampilan siswa.	Pengembangan diarahkan pada kesiapan menghadapi perkembangan zaman, dunia kerja, dan pendidikan tinggi.
Konteks lokal	Kurikulum mempertimbangkan potensi daerah dan nilai budaya masyarakat Sumbawa.	Potensi daerah dan nilai budaya diintegrasikan dalam pengalaman belajar siswa.
Dasar pengembangan	Pengembangan mempertimbangkan kebijakan pendidikan, hasil belajar siswa, dan kondisi sekolah.	Analisis peraturan terbaru dan hasil belajar digunakan sebagai bahan penyusunan kurikulum.
Pelibatan warga sekolah	Guru dan unsur sekolah dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum.	Dilakukan melalui rapat penyusunan, MGMP, lokakarya perangkat ajar, dan evaluasi akhir semester.
Pelibatan pemangku kepentingan	Masukan dari komite sekolah dan pemangku kepentingan digunakan dalam pengembangan kurikulum.	Masukan dihimpun sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penyempurnaan kurikulum.
Implementasi dan evaluasi	Hasil pengembangan dituangkan dalam program pembelajaran dan ditinjau secara berkala.	Kurikulum diterapkan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta dievaluasi secara berkala.

Berdasarkan Tabel 1, pengembangan kurikulum di SMAN 2 Sumbawa Besar berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pemahaman terhadap tujuan kurikulum, identifikasi konteks lokal, analisis kebijakan dan hasil belajar, hingga melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan. Temuan pada Tabel 1 juga menunjukkan bahwa Kepala Sekolah tidak hanya menentukan arah pengembangan kurikulum, tetapi mengoordinasikan proses penyusunan melalui keterlibatan guru, komite sekolah, dan pihak terkait. Hasil pengembangan kemudian diterapkan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta ditinjau melalui evaluasi berkala. Dengan demikian, Tabel 1 menggambarkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan melalui proses yang mempertimbangkan kebutuhan internal sekolah sekaligus konteks lingkungan dan perkembangan kebutuhan peserta didik.

Peran Kepala Sekolah dalam Proses Pengembangan

Kepala Sekolah menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran dengan menetapkan arah visi sekolah, memfasilitasi peningkatan kompetensi guru, dan melaksanakan supervisi akademik secara langsung. Koordinasi pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat rutin, diskusi kelompok mata pelajaran, pemantauan proses pembelajaran, serta komunikasi langsung ketika terdapat perubahan kebijakan atau kendala dalam pelaksanaan. Kepala Sekolah juga memberikan ruang kepada guru untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sehingga berbagai permasalahan dapat dibahas secara bersama-sama. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyampaikan bahwa kepala sekolah terlibat dalam penyusunan dokumen resmi, mendukung peningkatan kompetensi guru, dan memastikan pelaksanaan kurikulum tetap sesuai dengan kebijakan nasional serta kondisi sekolah. Sementara itu, guru menyampaikan bahwa arahan kepala sekolah diwujudkan melalui pelatihan internal seperti *In House Training* (IHT), pendampingan, dan dorongan untuk melakukan inovasi pembelajaran secara berkelanjutan. Bentuk koordinasi tersebut juga terlihat dalam kegiatan rapat yang melibatkan guru untuk membahas pembagian tugas dan pelaksanaan program sekolah. Untuk memperlihatkan bentuk koordinasi yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program sekolah, dokumentasi kegiatan rapat koordinasi pembagian tugas guru disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Rapat Koordinasi Pembagian Tugas Guru



Gambar 1 menunjukkan kegiatan rapat koordinasi yang melibatkan guru dalam pembagian tugas di SMAN 2 Sumbawa Besar. Kegiatan tersebut menggambarkan adanya proses koordinasi internal dalam memastikan pembagian tugas dapat mendukung pelaksanaan

program dan kegiatan sekolah. Rapat koordinasi pada Gambar 1 juga menjadi salah satu bentuk komunikasi antara pimpinan sekolah dan guru dalam mengatur pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dengan adanya koordinasi tersebut, pembagian tanggung jawab dapat disampaikan dan dibahas secara bersama sebelum program dilaksanakan.

Penyesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Masyarakat dan Kemitraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah melakukan penyesuaian pembelajaran dengan memanfaatkan kekhasan dan potensi daerah Sumbawa, antara lain pertanian, peternakan, kelautan, dan pariwisata. Potensi tersebut digunakan sebagai konteks pembelajaran agar materi yang diberikan kepada siswa memiliki keterkaitan dengan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Dalam mendukung pengembangan tersebut, sekolah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah, pelaku usaha, alumni, serta narasumber yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Bentuk kerja sama diwujudkan melalui kegiatan seminar, pembinaan prestasi, penelitian bersama, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan pemahaman karier siswa. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya bersumber dari pembelajaran di kelas, tetapi juga dari lingkungan sosial dan profesional di sekitar siswa.

Selain kegiatan yang berkaitan dengan potensi ekonomi daerah, sekolah juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengenal dan mempertahankan nilai budaya lokal sebagai bagian dari pengalaman pendidikan. Salah satu kegiatan yang menunjukkan upaya tersebut adalah pelaksanaan kegiatan Sabtu Budaya di lingkungan SMAN 2 Sumbawa Besar. Dokumentasi kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Kegiatan Sabtu Budaya di SMAN 2 Sumbawa Besar



Gambar 2 memperlihatkan pelaksanaan kegiatan Sabtu Budaya yang menjadi salah satu bentuk kegiatan sekolah dalam memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengenal dan mengaktualisasikan budaya lokal. Kegiatan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pengembangan pengalaman belajar tidak hanya diarahkan pada aspek akademik, tetapi juga memberikan ruang bagi penguatan nilai budaya dan karakter siswa. Pelaksanaan Sabtu Budaya menjadi bagian dari kegiatan sekolah yang berkaitan dengan konteks sosial dan budaya lingkungan peserta didik. Dengan demikian, Gambar 2 memperlihatkan bentuk kegiatan yang mendukung upaya sekolah mengaitkan pendidikan dengan karakteristik budaya masyarakat setempat.

Inovasi, Evaluasi, Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan kurikulum, sekolah menerapkan berbagai bentuk inovasi pembelajaran untuk menyesuaikan proses pendidikan dengan perkembangan kebutuhan peserta didik. Inovasi tersebut meliputi pembelajaran berbasis proyek, pendekatan Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika, pemanfaatan perangkat digital seperti SmartTV, penerapan penilaian berbasis teknologi, serta penguatan kemampuan dasar literasi dan numerasi. Kesesuaian pelaksanaan kurikulum dipantau melalui pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran, analisis hasil belajar, refleksi tertulis guru, serta masukan dari siswa dan orang tua. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberlangsungan program didukung oleh komitmen guru, dukungan komite sekolah, kepemimpinan kepala sekolah yang terbuka, dan upaya peningkatan sarana pembelajaran. Di sisi lain, sekolah masih menghadapi beberapa kendala, seperti jumlah ruang kelas yang belum seimbang dengan jumlah siswa, perbedaan kemampuan awal peserta didik, dan kebutuhan peningkatan kompetensi teknologi secara berkelanjutan. Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah menerapkan sistem perpindahan kelas, melakukan pengaturan jadwal secara cermat, meningkatkan kerja sama antarguru, dan melaksanakan pelatihan internal secara rutin. Salah satu bentuk peningkatan kompetensi guru yang dilakukan sekolah adalah *In House Training* (IHT) yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan pendekatan pembelajaran. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan mengenai koding, kecerdasan artifisial, dan pembelajaran mendalam sebagai bagian dari upaya sekolah meningkatkan kesiapan guru menghadapi perkembangan pembelajaran. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Pelaksanaan IHT Koding, Kecerdasan Artifisial, dan Pembelajaran Mendalam



Gambar 3 menunjukkan pelaksanaan kegiatan IHT yang diikuti oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait koding, kecerdasan artifisial, dan pembelajaran mendalam. Kegiatan pada Gambar 3 memperlihatkan bentuk pengembangan kompetensi guru yang dilakukan secara internal oleh sekolah. Pelaksanaan IHT tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendukung guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan tuntutan kompetensi peserta didik. Dengan demikian, Gambar 3 memperlihatkan bentuk kegiatan pengembangan profesional guru yang menjadi bagian dari upaya sekolah mendukung pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.

Pembahasan

Pemahaman dan Langkah Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kurikulum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Sekolah Penggerak memahami kurikulum yang relevan bukan sekadar sebagai dokumen untuk memenuhi tuntutan kebijakan, melainkan



sebagai perangkat pendidikan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, potensi daerah, serta tuntutan kehidupan setelah lulus. Pemahaman tersebut tercermin dalam perhatian terhadap pengembangan kompetensi akademik, karakter, dan keterampilan yang berorientasi pada kesiapan peserta didik menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Cara pandang ini menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi administratif menuju pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi sekolah. Pandangan tersebut sejalan dengan Rahayu et al. (2022) yang menjelaskan bahwa kurikulum perlu mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan di lapangan sehingga satuan pendidikan memiliki ruang untuk merespons kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.

Pemahaman tersebut selanjutnya diwujudkan melalui langkah pengembangan kurikulum yang dilakukan secara bertahap dan sistematis, mulai dari mencermati regulasi, menganalisis hasil belajar peserta didik, mempertimbangkan kondisi sekolah dan potensi lingkungan, hingga menuangkannya dalam dokumen kurikulum dan mengimplementasikannya melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam proses tersebut, kepala sekolah melibatkan guru melalui rapat kurikulum, MGMP, workshop penyusunan perangkat pembelajaran, serta evaluasi akhir semester. Pelibatan guru memungkinkan keputusan kurikulum mempertimbangkan pengalaman langsung dalam pembelajaran dan karakteristik peserta didik, sekaligus membangun rasa memiliki terhadap kurikulum yang dikembangkan. Kurniawan et al. (2024) menegaskan bahwa keterlibatan guru dan pemangku kepentingan dalam pengembangan serta evaluasi kurikulum membantu memastikan kebijakan dapat diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah. Pemberian ruang kepada guru untuk menyampaikan pandangan juga dapat memperkuat partisipasi dan otonomi guru dalam pengambilan keputusan kurikulum (Felicio & Moraes, 2023). Hal ini sejalan dengan Chimbunde dan Moreeng (2024) yang menyatakan bahwa partisipasi aktif guru sejak tahap perencanaan membantu meningkatkan pemahaman terhadap arah perubahan dan kesiapan dalam implementasi kurikulum.

Proses pengembangan tersebut tidak hanya melibatkan warga sekolah, tetapi juga diperluas melalui pemberian ruang bagi komite sekolah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan masukan. Langkah ini menunjukkan bahwa kepala sekolah memandang relevansi kurikulum sebagai hasil dari keterhubungan antara kebutuhan internal sekolah dengan perubahan sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar. Pelibatan komite, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu sekolah menghasilkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan nyata (Meirani et al., 2023). Dalam konteks SMAN 2 Sumbawa Besar, keterlibatan berbagai pihak tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan secara partisipatif dan tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi berlanjut pada implementasi serta evaluasi secara berkala. Dengan demikian, pengembangan kurikulum membentuk proses yang berkelanjutan melalui keterhubungan antara analisis kebutuhan peserta didik, pengalaman guru, kondisi sekolah, serta tuntutan lingkungan.

Peran Strategis Kepala Sekolah Penggerak dalam Pengembangan Kurikulum

Keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan kurikulum pada akhirnya tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai pengarah utama proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Sekolah Penggerak menjalankan peran yang lebih luas daripada sekadar mengelola administrasi kurikulum. Kepala sekolah berperan dalam menentukan arah pengembangan, mengoordinasikan warga sekolah, memfasilitasi peningkatan kompetensi guru,



melakukan supervisi akademik, serta membuka ruang komunikasi mengenai berbagai kebutuhan dan kendala pembelajaran. Peran tersebut menempatkan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang memastikan bahwa kebijakan kurikulum tidak berhenti pada tataran dokumen, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran. Temuan ini sejalan dengan Ningsih et al. (2024) yang menegaskan bahwa Kepala Sekolah Penggerak perlu menerapkan kepemimpinan yang adaptif dan partisipatif dengan orientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukan hanya pada penyelesaian administrasi sekolah.

Peran tersebut semakin terlihat melalui dukungan profesional yang diberikan kepada guru. Melalui pembinaan, supervisi, pelatihan internal, dan kegiatan *In House Training* (IHT), kepala sekolah membantu guru meningkatkan kemampuan dalam merespons perubahan pembelajaran dan perkembangan teknologi. Dukungan tersebut tidak hanya diberikan melalui kegiatan formal, tetapi juga diperkuat dengan komunikasi informal yang memberikan ruang bagi guru untuk menyampaikan gagasan, kesulitan, dan kebutuhan dalam melaksanakan pembelajaran. Pola pendampingan seperti ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah diarahkan pada penguatan kapasitas guru sebagai pelaksana utama kurikulum. Istijarti (2023) menunjukkan bahwa pendampingan dan dukungan profesional kepala sekolah berkaitan dengan peningkatan motivasi, kompetensi, dan kinerja guru. Oleh karena itu, peran kepala sekolah dalam penelitian ini tidak hanya bersifat mengarahkan, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung guru untuk berkembang dan melaksanakan kurikulum secara lebih adaptif.

Dukungan profesional tersebut berjalan beriringan dengan pola kepemimpinan yang memberikan ruang kepada guru untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan program sekolah. Keterbukaan terhadap masukan guru menciptakan komunikasi dua arah yang mendukung terbentuknya budaya kerja kolaboratif. Kondisi ini penting karena pengembangan kurikulum membutuhkan keputusan yang tidak hanya berasal dari kepala sekolah, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan guru sebagai pelaksana pembelajaran. Pemberian ruang bagi suara guru dalam proses perubahan kurikulum dapat memperkuat keterlibatan dan agensi guru dalam menerjemahkan kebijakan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran (Badal & Vandeyar, 2024). Dukungan kepala sekolah dan budaya sekolah yang kolaboratif juga berperan dalam memperkuat kepemimpinan guru serta menciptakan kondisi yang memungkinkan guru berkontribusi dalam pengembangan sekolah (Goh et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan Ningsih et al. (2024) mengenai pentingnya kepemimpinan partisipatif dan distributif dalam meningkatkan keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Ambawani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang mendorong kolaborasi dapat memperkuat kepercayaan dan partisipasi guru dalam mendukung perubahan di sekolah.

Peran Kepala Sekolah dalam Menyelaraskan Kurikulum dengan Kebutuhan Masyarakat dan Industri

Kepemimpinan yang partisipatif tersebut selanjutnya diarahkan pada upaya memastikan bahwa kurikulum memiliki keterkaitan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi yang terdapat di lingkungan Sumbawa Besar, khususnya bidang pertanian, peternakan, kelautan, dan pariwisata. Potensi tersebut menjadi pertimbangan dalam membangun pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah mendorong sekolah untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga memperhatikan karakter,



keterampilan, dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi kehidupan sosial maupun dunia kerja. Dengan pendekatan tersebut, lingkungan sekitar tidak hanya menjadi latar tempat berlangsungnya pendidikan, tetapi juga menjadi sumber pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan kurikulum. Temuan ini sejalan dengan Mpuangnan dan Ntombela (2024) yang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kurikulum dapat meningkatkan relevansi pembelajaran karena kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat menjadi bagian dari pertimbangan pengembangan kurikulum.

Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui pembangunan kemitraan dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah, pelaku usaha, alumni, dan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan seminar, pembinaan prestasi, penelitian bersama, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan pemahaman karier peserta didik. Kehadiran pihak eksternal tersebut memperluas sumber belajar sekaligus memberikan pengalaman yang lebih beragam kepada peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berlangsung melalui interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas, tetapi juga memperoleh pengayaan dari pengalaman dan pengetahuan pihak di luar sekolah. Temuan ini sejalan dengan Meirani et al. (2023) yang menunjukkan bahwa keterlibatan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan lapangan kerja. Dalam konteks ini, kemitraan menjadi salah satu strategi kepala sekolah untuk mempertemukan pembelajaran sekolah dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan dunia kerja.

Pengintegrasian potensi lokal melalui pembelajaran dan pembangunan kemitraan menunjukkan bahwa relevansi kurikulum tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan industri, tetapi juga dengan budaya dan karakteristik masyarakat setempat. Kurikulum yang memperhatikan lingkungan lokal dapat membantu peserta didik memahami hubungan antara pengetahuan yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan di sekitarnya. Pendekatan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi sekolah untuk mempertahankan nilai budaya dan karakter lokal di tengah perubahan zaman. Carolina et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengintegrasikan potensi lokal ke dalam pembelajaran sehingga pengalaman belajar dapat lebih dekat dengan kondisi nyata lingkungan peserta didik. Fleksibilitas tersebut memungkinkan sekolah mengembangkan pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik daerah sekaligus kebutuhan peserta didik, sehingga kurikulum tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi, tetapi juga relevan dengan konteks lokal. Dalam konteks penelitian ini, peran kepala sekolah tampak sebagai penghubung antara tuntutan kebijakan pendidikan, karakteristik daerah, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan masa depan peserta didik.

Inovasi, Evaluasi, dan Respons terhadap Kendala dalam Pengembangan Kurikulum

Penyelarasan kurikulum dengan konteks lokal dan kebutuhan masa depan tercermin dalam berbagai inovasi pembelajaran yang dikembangkan di SMAN 2 Sumbawa Besar, seperti pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan STEM, penggunaan perangkat digital seperti SmartTV, asesmen berbasis teknologi, serta penguatan literasi dan numerasi. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak hanya mendorong kurikulum agar sesuai dengan potensi lokal, tetapi juga mengarahkannya untuk merespons perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi peserta didik pada era digital. Namun, inovasi tidak diposisikan sebagai tujuan akhir karena penerapannya tetap membutuhkan pemantauan dan evaluasi agar sesuai



dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan langsung di kelas, analisis hasil belajar, refleksi tertulis guru, serta masukan dari peserta didik dan orang tua yang kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan. Dengan demikian, inovasi dan evaluasi menjadi bagian yang saling berkaitan dalam pengembangan kurikulum yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Donatille et al. (2025) yang menjelaskan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum dapat memperkuat efektivitas implementasi serta mendorong perbaikan secara berkelanjutan.

Proses pengembangan kurikulum tersebut berlangsung di tengah sejumlah kendala, seperti keterbatasan jumlah ruang kelas dibandingkan dengan jumlah peserta didik, perbedaan kemampuan awal peserta didik, serta kebutuhan peningkatan kompetensi teknologi guru secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menuntut kepala sekolah untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan sumber daya dan situasi nyata sekolah. Respons yang dilakukan meliputi penerapan sistem rotasi kelas, pengaturan jadwal secara cermat, penguatan kolaborasi antarguru, serta pelaksanaan pelatihan internal secara rutin. Strategi tersebut menunjukkan bahwa peran kepala sekolah tidak hanya berkaitan dengan perencanaan kurikulum, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola sumber daya dan mengatasi hambatan dalam implementasinya. Temuan ini sejalan dengan Nari et al. (2024) yang menempatkan kepala sekolah sebagai *change leader* yang berperan dalam mengorganisasi pengembangan profesional guru, membangun kolaborasi, dan mengelola sumber daya untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.

Salah satu kebutuhan yang perlu terus diperkuat dalam menghadapi perubahan tersebut adalah kompetensi digital guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah merespons kebutuhan ini melalui kegiatan IHT dan penguatan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk koding, kecerdasan artifisial, dan pembelajaran mendalam. Upaya tersebut menunjukkan bahwa peran kepala sekolah berlanjut dari penyusunan kurikulum menuju penciptaan kondisi yang memungkinkan guru mengembangkan kemampuan sesuai dengan perubahan kebutuhan pembelajaran. Nari et al. (2024) menegaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka membutuhkan pengembangan profesional berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, dan kebijakan sekolah yang mendorong inovasi. Oleh karena itu, keberlanjutan relevansi kurikulum tidak hanya bergantung pada kesesuaian isi kurikulum, tetapi juga pada kemampuan sekolah membangun ekosistem yang mendukung implementasinya. Dalam konteks ini, kemampuan kepala sekolah menghubungkan perencanaan kurikulum, pengembangan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta perkembangan dunia kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Sekolah Penggerak di SMAN 2 Sumbawa Besar memahami pengembangan kurikulum sebagai proses yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, potensi daerah, serta tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Proses tersebut dilakukan melalui penelaahan regulasi dan hasil belajar, identifikasi kondisi serta potensi sekolah, pelibatan guru, komite, dan pemangku kepentingan, penyusunan dan implementasi kurikulum, serta evaluasi berkala. Kepala sekolah berperan dalam mengarahkan visi, mengoordinasikan warga sekolah, meningkatkan kompetensi guru, melakukan supervisi, membangun komunikasi, dan mendorong inovasi. Penyelarasan kurikulum dilakukan dengan



memanfaatkan potensi pertanian, peternakan, kelautan, dan pariwisata Sumbawa serta membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, pemerintah, pelaku usaha, alumni, dan narasumber terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kurikulum yang kontekstual memerlukan kepemimpinan partisipatif, adaptif, dan kolaboratif.

Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif deskriptif di satu sekolah dan belum mengukur dampak jangka panjang pengembangan kurikulum terhadap hasil belajar, kesiapan lulusan, dan keberlanjutan kemitraan. Pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan evaluasi, kompetensi guru, kemitraan, dan pemanfaatan potensi lokal secara sistematis. Penelitian berikutnya dapat melibatkan lebih banyak sekolah dengan karakteristik wilayah berbeda serta menggunakan pendekatan longitudinal atau metode campuran untuk mengkaji dampak pengembangan kurikulum terhadap kualitas pembelajaran dan kesiapan peserta didik menghadapi pendidikan lanjutan maupun dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, P., Moazzam, M., Ashraf, A., & Khan, M. N. (2024). The interdisciplinary curriculum alignment to enhance graduates' employability and universities' sustainability. *The International Journal of Management Education*, 22(3), 101037. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2024.101037>
- Ambawani, C. S. L., Saputra, I., Kusuma, T. M. M., Sumardjoko, B., & Fathoni, A. (2024). Implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah penggerak di TK. *Journal of Education Research*, 5(4), 4810–4823. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1578>
- Borah, D., Malik, K., & Massini, S. (2021). Teaching-focused university–industry collaborations: Determinants and impact on graduates' employability competencies. *Research Policy*, 50(3), 104172. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104172>
- Carolina, H. S., Riandi, & Rochintaniawati, D. (2024). Integrasi potensi lokal dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Al-Jahiz: Journal of Biology Education Research*, 5(2), 125–137. <https://doi.org/10.32332/al-jahiz.v5i2.9413>
- Donatille, B., Emmanuel, C. B., Uwimana, J. L., & Niyobuhungiro, E. (2025). The role of stakeholder collaboration and community engagement in enhancing curriculum implementation and adaptation in schools. *East African Journal of Education Studies*, 8(4), 208–225. <https://doi.org/10.37284/eajes.8.4.3913>
- Faishal. (2024). Relevansi kurikulum lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(1), 84–111. <https://doi.org/10.61088/tadibi.v13i1.804>
- Felício, H. M. dos S., & Moraes, A. S. (2023). The teaching voice in the construction of the school curriculum. *Revista Contexto & Educação*, 38(120), e12183. <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2023.120.12183>
- Goh, S. Y., Yeap, S. B., & Thien, L. M. (2023). Enhancing teacher leadership in Malaysian secondary schools: Do collaborative school culture and principal support matter? *Asia Pacific Journal of Educators and Education*, 38(2). <https://doi.org/10.21315/apjee2023.38.2.10>
- Hasan, R., Nuthihar, R., & Hanif, H. (2022). Manajemen kemitraan perguruan tinggi vokasi dalam meningkatkan kompetensi lulusan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 376–384. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8145>
- Islamiah, N., Hariyati, N., & Murtadlo, M. (2022). Strategi SMK dalam menjalin kerjasama reciprocal dengan industri dan dunia kerja. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*,



- 10(2), 180–189. <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i2.53249>
- Isa, Asrori, M., & Muharini, R. (2022). Peran kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 9946–9957. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4175>
- Istijarti, A. (2023). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. *JJDMP: Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 7(2), 164–175. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v7n2.p164-175>
- Kurniawan, B., Rahmawati, F. P., & Ghufro, A. (2024). Dinamika penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar: Tinjauan literatur sistematis. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(3), 1672–1678. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i3.1229>
- Lohberger, K., & Braun, E. (2022). Comparing learning opportunities of generic skills in higher education to the requirements of the labour market. *Frontiers in Education*, 7, 886307. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.886307>
- Mayger, L., & Provinzano, K. (2022). Leadership for family and community engagement: A qualitative policy analysis of state principal evaluation processes. *Educational Administration Quarterly*, 58(1), 60–95. <https://doi.org/10.1177/0013161X211052501>
- Meirani, R. K., Supriyanto, A., & Imron, A. (2023). Implementasi total quality management melalui penjaminan mutu dan pelibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum SMK PK. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 115–131. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2023.v10.i2.p115-131>
- Mpuangnan, K. N., & Ntombela, S. (2024). Community voices in curriculum development. *Curriculum Perspectives*, 44(1), 49–60. <https://doi.org/10.1007/s41297-023-00223-w>
- Nari, N., Khaidir, C., Arif, Y., Gistituati, N., & Rusdinal, R. (2024). The role, strategies, and innovations of school principals as change leaders in the implementation of the Independent Curriculum. *International Journal of Educational Dynamics*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.24036/ijeds.v7i1.457>
- Neiroukh, N. N., Ansari, A. A., Abu Dalu, R. A., Khlaif, E., Barahmach, D., Zubeidi, J., Shtayeh, B., & Daher, W. (2024). Organizational communication competence of public secondary school principals through utilizing WhatsApp. *Frontiers in Education*, 9, 1374279. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1374279>
- Ningsih, E. I. K., Mesiono, & Lubis, M. S. (2024). Model kepemimpinan kepala sekolah di sekolah penggerak. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 349–361. <https://doi.org/10.29210/1202424227>
- Nisa, W. M. (2022). Pembelajaran terintegrasi “POLOS” (potensi lokal sekolah) dalam peningkatan minat belajar IPA siswa. *Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar*, 6(3), 1125–1138. <https://doi.org/10.26811/didaktika.v7i1.760>
- OECD. (2021). *Adapting curriculum to bridge equity gaps: Towards an inclusive curriculum*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6b49e118-en>
- Otache, I. (2022). Enhancing graduates’ employability through polytechnic–industry collaboration. *Industry and Higher Education*, 36(5). <https://doi.org/10.1177/09504222211063140>
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, H., & Prihantini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka belajar di sekolah penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313–6319. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230>
- Setiyana, A., & Oktora, S. I. (2024). Analisis horizontal mismatch pada tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 19(2), 109–



124. <https://doi.org/10.55980/jki.2024.5513>
Utaminingsih, S., Yusro, & Sofiyati, D. (2023). Kepemimpinan kepala sekolah penggerak dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Equity in Education Journal*, 5(2), 121–130. <https://doi.org/10.37304/eej.v5i2.11027>
Winarto, R. H., & Rindaningsih, I. (2025). The principal's role in implementing Merdeka Curriculum in elementary schools: Peran kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Indonesian Journal of Education Methods Development*, 20(3). <https://doi.org/10.21070/ijemd.v20i3.905>